
Studi Antropologi Hubungan Manusia Dengan Sungai dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Medan

Murni Eva Marlina Rumapea¹, Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak², Tri Nur Putri³, Pramudita⁴, Manuel Paian Desmon Siallagan⁵

Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: murnieva@unimed.ac.id¹, danielhp@unimed.ac.id², trinurputri@unimed.ac.id³, pramudita@unimed.ac.id⁴, manuelsiallagan5555@gmail.com⁵

Article History:

Received: 02 Juni 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: Mitigasi Banjir;
Kearifan Lokal; Sungai Deli;
Etnografi

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma hubungan masyarakat Kota Medan dengan Sungai Deli dan Sungai Babura, dari pusat peradaban dan perdagangan menjadi sumber ancaman bencana banjir. Selama ini, mitigasi banjir cenderung bersifat teknokratis-struktural (betonisasi) yang sering kali mengabaikan dimensi kebudayaan dan kearifan lokal, sehingga mengalami jalan buntu saat berbenturan dengan praktik hidup masyarakat bantaran sungai. Tujuan utama penelitian ini adalah menggali kembali kearifan lokal, strategi adaptasi berbasis budaya (local genius), dan konstruksi sosial masyarakat terhadap sungai guna merumuskan rekomendasi kebijakan mitigasi bencana yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif etnografi untuk memahami pandangan dunia (world view) masyarakat melalui deskripsi mendalam (thick description). Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data primer melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tokoh masyarakat serta agen pemerintah, menggunakan perspektif emik untuk menginterpretasikan jaringan makna budaya di balik perilaku masyarakat di zona banjir. Luaran yang ditargetkan mencakup laporan penelitian dan publikasi ilmiah (jurnal/artikel) yang memberikan rekomendasi kebijakan mitigasi berbasis budaya. Uraian TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) yang diusulkan berada pada level Penelitian Dasar, yang berfokus pada pembuktian konsep dan prinsip dasar dari hubungan sosio- antropologis manusia dengan sungai sebagai ekosistem budaya.

PENDAHULUAN

Kota Medan adalah Ibukota Provinsi Sumatera Utara yang tumbuh dan berkembang dari Delta Deli. Secara historis, sungai berfungsi sebagai jalur perdagangan dan identitas budaya yang menjadi awal peradaban manusia. Di Indonesia, sungai bukan sekadar saluran drainase alami, melainkan ruang sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakatnya. Kota Medan merupakan contoh nyata yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dua sungai utama, yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura, yang sejak era Kesultanan Deli telah menjadi urat nadi transportasi dan membentuk pemukiman hingga saat ini. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, hubungan manusia dengan sungai di Kota Medan mengalami pergeseran paradigma yang paradoks. Di satu sisi, sungai menjadi tumpuan hidup dan ruang bermukim, terutama bagi kelompok marginal di bantaran sungai. Di sisi lain, sungai diposisikan sebagai ancaman melalui bencana banjir tahunan yang semakin destruktif. Bencana banjir di Kota Medan sering kali hanya dipandang melalui kacamata teknokratis dan hidrologis, sehingga solusi yang ditawarkan cenderung bersifat struktural seperti betonisasi. Pandangan ini sering mengabaikan aspek manusia dan dimensi kebudayaan. Secara antropologis, bencana bukan hanya peristiwa alam, melainkan hasil interaksi sosial budaya yang tidak selaras antara manusia dengan lingkungan.

Di tengah dominasi mitigasi banjir yang bersifat teknokratis-struktural, diskursus kontemporer mulai bergeser pada penguatan ketahanan berbasis komunitas. Penelitian terbaru oleh Aksa [4] dan Hanif et al. menegaskan bahwa modal sosial dan kearifan lokal merupakan faktor kunci keberhasilan mitigasi di Indonesia yang sering kali lebih efektif dibandingkan pendekatan *top-down*. Meskipun studi Hutagalung telah memotret profil demografis masyarakat bantaran Sungai Deli, kajian tersebut belum membedah secara mendalam jaringan makna budaya di balik perilaku masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam literatur mengenai bagaimana persepsi subjektif masyarakat perkotaan terhadap sungai memengaruhi pola adaptasi mereka di zona risiko.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan etnografi urban untuk merekonstruksi hubungan manusia-sungai di Sungai Deli dan Babura sebagai sebuah "ekosistem budaya." Berbeda dengan studi Ariyanti et al. yang berfokus pada mitigasi budaya di pedesaan, penelitian ini mengambil lokus masyarakat perkotaan dengan karakter adaptasi yang lebih kompleks. Melalui perspektif emik, penelitian ini mengungkap *hidden knowledge* dan praktik keseharian yang menurut Rosiana mulai terkikis oleh modernitas namun tetap menjadi dasar tindakan masyarakat. Luaran penelitian ini memberikan kontribusi orisinal berupa rekomendasi kebijakan mitigasi inklusif yang mensinergikan infrastruktur fisik dengan struktur sosiokultural. Masyarakat bantaran sungai di Kota Medan, seperti di Kelurahan Hamdan (kawasan Kampung Aur dan Kampung Badur), memiliki alasan kuat untuk bertahan meski berada di daerah rawan bencana karena faktor keterikatan sosial-ekonomi yang tinggi. Mereka sebenarnya memiliki pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan memori kolektif dalam membaca tanda-tanda alam, menentukan batas aman hunian, hingga menciptakan mekanisme solidaritas sosial. Strategi adaptasi komunitas ini menjadi kunci penting dalam menghadapi risiko banjir di wilayah pemukiman mereka.

Ketegangan muncul ketika kebijakan mitigasi pemerintah (*top-down*) berbenturan dengan praktik hidup sehari-hari masyarakat (*bottom-up*). Upaya relokasi atau pembangunan tanggul sering kali tercerabut dari akar budaya masyarakat, sehingga kebijakan mengalami jalan buntu karena gagal memahami "logika kebudayaan" warga. Penguatan kembali penanggulangan bencana berbasis masyarakat menjadi sangat krusial dengan belajar dari kearifan lokal yang telah lama ada di Indonesia. Pergeseran ke mitigasi modern terkadang justru menghilangkan media komunikasi tradisional dan ritual yang sebenarnya efektif dalam memberikan peringatan dini.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori Clifford Geertz "*The Interpretation of Cultures*" (1973), beliau berargumen bahwa tugas utama antropologi bukan sekedar mencatat perilaku (*thin description*/deskripsi tipis), melainkan menginterpretasikan lapisan-lapisan makna yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Manusia bagi Geertz, tidak sekedar bereaksi terhadap stimulus lingkungan. Beliau menenun jaring-jaring makna (*webs of significance*) yang kemudian ia tinggali. Budaya adalah jaring makna itu sendiri. *Thick description* bekerja pada prinsip bahwa setiap tindakan manusia mengandung lapisan makna yang berlapis-lapis (*layered meanings*) yang hanya dapat dipahami jika peneliti masuk ke dalam konteks budaya, sejarah, dan sosial dimana tindakan itu terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengungkap kearifan lokal (*indigenous knowledge*) masyarakat bantaran sungai di Medan dalam menghadapi banjir. Tim Peneliti menggali perspektif emik (sudut pandang warga) untuk memahami alasan mereka tetap tinggal di zona bahaya dan bagaimana mereka memaknai tanda-tanda alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi, yang bukan hanya mengamati, melainkan upaya untuk memahami pandangan dunia (*world view*) masyarakat terhadap sungai. Dalam konteks mitigasi banjir, etnografi akan mengungkap pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dan perilaku keseharian yang mungkin tidak terungkap oleh survei kuantitatif. Fokus utama adalah mendeskripsikan secara mendalam (*thick description*) [7] budaya, norma, dan praktik hidup masyarakat bantaran sungai. Pendekatan etnografi bukan hanya mengumpulkan data, tetapi menginterpretasikan jaringan makna (*webs of significance*) yang dibentuk.

Penelitian ini bukan hanya peristiwa hidrologi, tetapi memiliki makna budaya tertentu bagi warga Medan. Selain itu, perspektif emik adalah mengutamakan sudut pandang orang dalam (*insider's point of view*) [8] tentang mengapa mereka memilih tetap tinggal di zona banjir, meskipun secara teknis geografis dianggap bahaya (perspektif etik), atau bagaimana mereka menginterpretasikan tanda-tanda alam sebelum banjir datang. Dalam pengumpulan data, menggunakan in depth interview adalah wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan agen pemerintah.

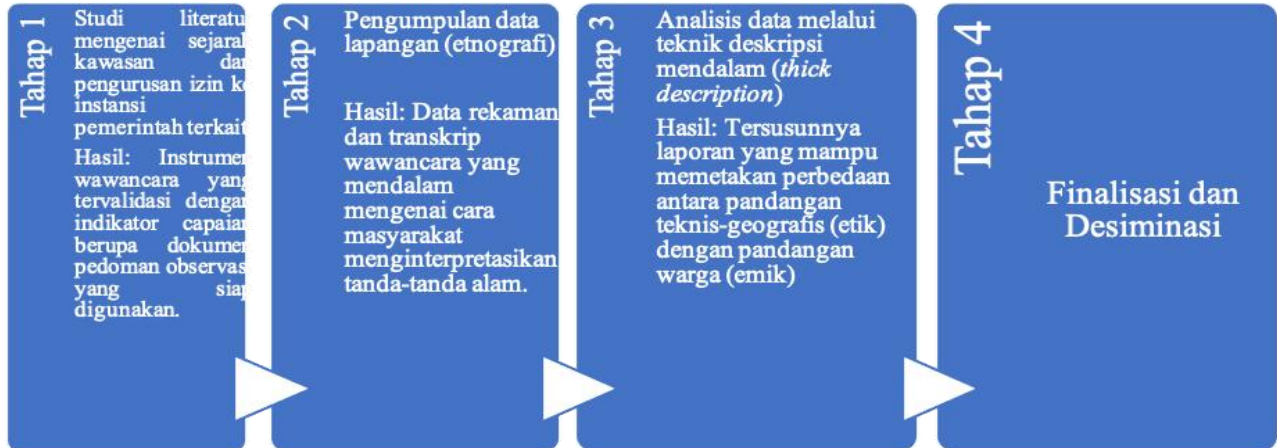
Penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama yang dirancang secara sistematis untuk menggali kearifan lokal masyarakat bantaran sungai di Kota Medan. Adapun tahapan yang dimaksud peneliti jelaskan secara ringkas berikut ini:

Tahap pertama dimulai dengan persiapan yang meliputi studi literatur mengenai sejarah kawasan dan pengurusan izin ke instansi pemerintah terkait. Hasil yang diharapkan adalah instrumen wawancara yang tervalidasi dengan indikator capaian berupa dokumen pedoman observasi yang siap digunakan. **Tahap kedua** merupakan inti dari pengumpulan data lapangan menggunakan perspektif emik. Tim akan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terpumpun kepada tokoh adat, masyarakat setempat, dan agen pemerintah untuk mengungkap alasan budaya warga tetap bertahan di zona banjir. Hasil dari tahap ini adalah data rekaman dan transkrip wawancara yang mendalam mengenai cara masyarakat menginterpretasikan tanda-tanda alam.

Tahap ketiga berfokus pada analisis data melalui teknik deskripsi mendalam (*thick description*). Peneliti akan menginterpretasikan perilaku keseharian dan norma masyarakat untuk menemukan pola mitigasi banjir berbasis kearifan lokal. Indikator capaian pada tahap ini adalah

tersusunnya laporan yang mampu memetakan perbedaan antara pandangan teknis- geografis (etik) dengan pandangan warga (emik). **Tahap keempat** adalah finalisasi dan diseminasi hasil penelitian. Peneliti akan menyusun rekomendasi kebijakan mitigasi bencana yang relevan bagi pemerintah Kota Medan serta mempublikasikannya ke jurnal ilmiah. Hasil akhir yang diharapkan adalah draf kebijakan dan artikel ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik

Penjelasan di atas dapat dilihat dalam Gambar 2. Alur Penelitian di bawah ini:



Gambar 2. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada rumusan masalah diawali dari tingkat kesadaran bahwa bencana banjir bukan suatu fenomena alam (*natural hazard*) melainkan juga fenomena sosial-budaya yang dibentuk oleh cara manusia memaknai, merespons, dan hidup bersama sungai. Dalam konteks antropologi, konstruksi budaya merujuk pada proses sosial bahwa masyarakat secara kolektif membangun sistem makna, nilai, norma, dan praktik yang membentuk cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya termasuk sungai Koentjaraningrat (1990). Dalam pemahaman sungai sebagai entitas budaya (Wisner, Ben, Piers, 2024) di Kota Medan, terdapat beberapa sungai utama seperti; Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan, dan Sungai Sei Sikambing. Secara historis, keempat sungai menjadi tulang punggung peradaban kota. Keempat sungai bukan hanya sekedar badan air, akan tetapi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Suganda, Emirhadi, dkk, 2009).

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sungai dapat digunakan bahwa sebagai; (1) Sumber kehidupan, artinya sungai sebagai air bersih, sumber ikan dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, dan sebagai jalur transportasi, (2) Penanda Identitas Komunal, artinya daerah pinggiran sungai dapat dijadikan tempat tinggal masyarakat atau sering disebut kampung tepi sungai. Selain itu, ada juga yang menyatakan masyarakat bantaran, yaitu sekelompok orang yang tinggal di wilayah bantaran sungai. Bantaran sungai adalah lokasi atau lahan yang berada pada kedua sisi (kiri, kanan) sepanjang palung sungai, (3) Ruang Ritual dan Simbolik, artinya lokasi sungai dan pinggiran sungai dapat digunakan untuk pelaksanaan upacara adat dan kepercayaan lokal, (4) Penanda Batas Sosial dan Teritorial antar kelompok etnis, artinya daerah pinggiran sungai atau bantaran sungai memiliki batas teritorial untuk kelompok etnis, seperti Etnis Jawa, Batak, Melayu, Tionghoa. Batas ini dengan tujuan agar lebih mudah berinteraksi dalam budaya, namun tetap

memiliki sifat solidaritas antar kelompok etnis.

Menurut Clifford Geertz "*The Interpretation of Cultures*" (1973), beliau berargumen bahwa tugas utama antropologi bukan sekedar mencatat perilaku (*think description*/deskripsi tipis), melainkan menginterpretasikan lapisan-lapisan makna yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Manusia bagi Geertz, tidak sekedar bereaksi terhadap stimulus lingkungan. Beliau menenun jaring-jaring makna (*webs of significance*) yang kemudian ia tinggali. Budaya adalah jaring makna itu sendiri. *Thick description* bekerja pada prinsip bahwa setiap tindakan manusia mengandung lapisan makna yang berlapis-lapis (*layered meanings*) yang hanya dapat dipahami jika peneliti masuk ke dalam konteks budaya, sejarah, dan sosial dimana tindakan itu terjadi. Dalam konteks penelitian ini, sungai dan banjir adalah teks budaya yang harus dikaji lebih dalam. Tidak cukup hanya mengatakan masyarakat bantaran sungai di Kota Medan tidak mau pindah rumah meskipun banjir. *Thick description* menuntut agar mengkaji lebih dalam, mengapa dalam logika budaya mereka keputusan untuk pindah rumah atau mencari lokasi tempat tinggal tidak dilakukan.

Dengan menggunakan teori Geertz *The Interpretation of Cultures* (1973), sungai-sungai di Kota Medan (Sungai Deli, Babura, Belawan, Sei Sikambing) memiliki lapisan makna yang berlapis dan kompleks. Maka dari itu, makna yang Pertama, Makna Kosmologi, bagi Etnis Melayu Deli yang secara historis mendominasi bantaran Sungai Deli, memaknai sungai bukan hanya sekedar badan air (Mursin, Zulzaman, Hardin, 2025). Sungai dapat dikatakan sebagai entitas kosmologi Keesing (1992). Artinya, bagi Etnis Melayu (a) sungai adalah "urat nadi" (arteri) kehidupan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia leluhur, dan alam gaib, (b) sungai juga memiliki Roh penjaga (penunggu sungai) yang diyakini mendiami pusaran dan bagian dalam sungai, (c) banjir dalam konstruksi kosmologis tidak sekedar fenomena hidrologis, akan tetapi dapat bermakna manifestasi kemarahan atau peringatan dari entitas sungai yang dilanggar, Kedua, Makna Historis-Genealogis (Stuart, Paul, 1996), Sungai Deli secara historis adalah pusat peradaban Kesultanan Deli. Makna historis menciptakan lapisan makna yang dalam, yaitu; (a) sungai adalah saksi sejarah, adalah tempat bahwasannya identitas komunal terbentuk, (b) tinggal di tepi sungai berarti berada dalam garis kesinambungan dengan leluhur, (c) banjir dalam makna historis seringkali dimaknai sebagai "sungai yang ingat dirinya" kembali ke keadaan alaminya sebelum didesak oleh pembangunan. Artinya sungai memiliki nilai-nilai historis dengan agar masyarakat lebih memahami dan melestarikannya, Ketiga, Makna Ruang Sosial-Relasional (Henri 2004, Kusno 2009), sungai adalah ruang sosial (*social space*) tempat kehidupan komunal berlangsung; (a) mencuci, mandi, bersosialisasi, tukar informasi), (b) penanda batas sosial sekaligus jembatan relasi antar komunitas, (c) bagi komunitas Batak yang bermigrasi ke Medan sungai menjadi penghubung dengan memori kampung halaman (*huta*) di Tapanuli, Keempat, Makna Ekonomi-Subsistensi (Wisner, Ben, Blaikie 2004, Mulyandri dan Bhayusukma 2015), artinya, (a) sungai adalah sumber kehidupan langsung (nelayan, pedagang perahu, penambang pasir), (b) banjir dalam makna ekonomi dimaknai secara ambivalen disatu sisi merugikan, disisi lain membawa lumpur subur yang menyuburkan lahan pertanian di hilir, (c) makna ekonomi dapat menciptakan rasionalitas bertahan di bantaran sungai yang sering disalahpahami oleh kebijakan relokasi. Artinya belum ada kebijakan atau solusi dari pemerintah untuk mengatasinya, Kelima, Makna Eksistensial-Identitas Kusno (2009), artinya, (a) masyarakat pinggiran sungai menyatakan bentuk identitas "kami adalah orang sungai", (b) meninggalkan sungai bukan sekedar meninggalkan rumah/tempat tinggal, tetapi itu adalah kehilangan diri sendiri, (c) banjir adalah bagian dari identitas; "sudah biasa mengalami banjir, maka sudah tahu cara mengatasinya.

Konsep nilai dalam *Thick Description* adalah standar-standar moral dan estetika yang digunakan masyarakat untuk menilai tindakan, situasi, dan pilihan. Nilai tidak terlepas dari makna, bahwasannya nilai adalah makna yang diinternalisasi menjadi orientasi tindakan. Geertz

menekankan bahwa nilai budaya bersifat “*sacred*”, tidak mudah digoyahkan oleh argumen rasional eksternal, karena nilai menyentuh lapisan terdalam identitas kolektif Kusno (2009). Pertama, Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong Dalam menghadapi Banjir. Pada bantaran sungai di Kota Medan, banjir paradoksnya memperkuat solidaritas sosial. Nilai gotong royong dalam menghadapi banjir terwujud dalam, (a) sistem peringatan informal terlihat jika warga yang melihat air naik, segera memberitahu tetangga (nilai tanggung jawab komunal), (b) berbagi sumber daya pada saat banjir (makanan, perahu, tempat tinggal sementara), (c) kerja bakti pasca banjir sebagai ritual pemulihan komunal, Kedua, Nilai Kepatuhan Pada Sungai Sebagai Entitas yang dihormati (Wisner, Ben, Blaikie, 2004), artinya, (a) larangan membuang benda-benda tertentu ke sungai (besi, sampah, sisa ritual), (b) kewajiban menjaga kebersihan bagian sungai yang “sakral” (c) paradoksnya, nilai ini hidup berdampingan dengan praktik pembuangan sampah (menunjukkan fragmentasi nilai akibat modernisasi), Ketiga, Ketekunan dan Resiliensi, artinya, (a) nilai tabah dan sabar dalam menghadapi banjir bersumber dari internalisasi banjir sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan, (b) nilai ini menciptakan resiliensi kultural yang sering sekali lebih efektif dari intervensi pemerintah jangka pendek, (c) namun nilai ini juga dapat menjadi hambatan jika ditafsirkan sebagai kepasrahan total (*fatalism*), Keempat, Penghormatan Terhadap Leluhur dan Warisan Tempat Keesing (1992), artinya, (a) nilai hormat kepada leluhur yang telah membangun kehidupan di tepian sungai menjadi justifikasi kultural untuk bertahan, (b) meninggalkan tempat tinggal leluhur dianggap melanggar nilai penghormatan (tidak menghargai perjuangan orang tua), (c) nilai ini adalah nilai yang secara langsung berkontestasi dengan kebijakan relokasi, Kelima, Nilai Lokal dan Nilai Modernitas Ayatrohaedi (1986).

Nilai Lokal	Nilai Modernitas
Sungai ; saudara/leluhur	Sungai; sumber daya/resiko
Banjir; peringatan alam	Banjir; kegagalan teknis
Bertahan; kesetiaan	Bertahan; irrasional
Komunitas; identitas	Komunitas; hambatan relokasi
Kearifan Lokal; sah	Kearifan Lokal; mitos belaka

Dalam konsep norma dalam *thick description* adalah aturan-aturan perilaku yang lahir dari internalisasi nilai. Dalam *thick description*, norma tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis atau hukum formal, melainkan juga sebagai “aturan yang tidak terucap” (*tacit rules*) yang mengatur interaksi manusia dengan sungai dan banjir. Geertz menekankan bahwa norma budaya bekerja bukan melalui paksaan eksternal, melainkan melalui internalisasi yang membuat penyimpangan terasa “salah secara moral”. Sistem norma dan relasi masyarakat Koetjaraningrat (1990) bantaran sungai di Kota Medan; Pertama, Norma Ritual dan Seremonial Keesing (1992), artinya ada larangan-larangan (tabu) yang berkaitan dengan sungai; (a) larangan berkata kasar di tepi sungai, diyakini dapat memancing murka penunggu sungai, (b) larangan membuang sembarangan benda tajam (kaca, besi), (c) larangan berenang atau memancing pada waktu tertentu (tengah hari, magrib), (d) pada komunitas Melayu Deli dilarang melewati sungai tanpa mengucapkan permisi (permisi kepada penunggu). Beberapa contoh ritual berkaitan dengan sungai seperti ritual tolak bala sebelum musim hujan (memohon agar banjir tidak melanda permukiman), kenduri sungai (selamatan yang dipersembahkan kepada sungai sebagai ungkapan syukur dan permohonan keselamatan), ritual pasca banjir (membersihkan sisa banjir dengan doa-doa tertentu sebelum menghuni kembali rumah), Kedua, Norma Sosial Dalam Menghadapi Banjir Koentjaraningrat (1990), artinya, (a) norma saling membantu tanpa pamrih saat banjir (menolak bantuan digolongkan sebagai sombong), (b) norma tidak mengeluh berlebihan (banjir adalah

bagian dari hidup, mengeluh dianggap lemah), (c) norma pelaporan kolektif (jika air sungai naik, ada kewajiban moral memberitahu tetangga sebelum mengurus harta benda sendiri), Ketiga, Norma Tata Kelola Ruang Bantaran Kusno (2009), artinya, (a) norma tidak membangun permanen terlalu dekat dengan tepi sungai meskipun sering dilanggar karena tekanan ekonomi, (b) norma penggunaan sungai bergilir (ada pembagian tidak tertulis tentang siapa menggunakan bagian sungai mana dan kapan), (c) norma menjaga “kesucian” bagian tertentu sungai yang dianggap keramat, Keempat, Norma Lintas Etnis Dalam Konteks Multikultural (Wisner, Ben, Blaikie 2004) di Kota Medan, artinya Kota Medan sebagai kota multi etnis memiliki pluralism normatif dalam relasi dengan sungai.

Komunitas	Norma Khas	Relasi Dengan Banjir
Melayu Deli	Menjaga amanah sungai sebagai warisan sultan	Banjir (sungai) “ingat” batasnya
Batak Toba	Solidaritas marga dalam penanggulangan	Gotong rotong yang berbasis klan
Jawa	Prinsip tepa selira (rasa saling menjaga)	Nrimo dalam menghadapi banjir
Tionghoa Medan	Ritual fengsui berkaitan dengan air	Air harus mengalir, bukan menggenang
Karo	Menghormati kalimbubu (alam)	Banjir sebagai sinyal perlu ritual

Lebih lanjut adalah Kelima, Erosi Norma (Tantangan Modernisasi) Koentjaraningrat (1990), artinya, (a) norma larangan membuang sampah ke sungai karena terkikis oleh gaya hidup konsumtif modern, (b) norma ritual sungai (melemah) akibat sekularisasi dan stigma “musyrik”, norma tata ruang bantaran (hancur) oleh spekulasi tanah dan pertumbuhan kota, (c) norma gotong royong (terancam oleh individualism urban), (d) norma tata ruang bantaran (hancur oleh spekulasi tanah dan pertumbuhan kota). Pada pengkajian rumusan masalah kedua adalah praktik pengetahuan local (*local genius*) (Ajip 2011, Ayatrohaedi 1986, Francis 2002) dalam sistem peringatan dini dan manajemen resiko bencana yang dilakukan secara mandiri atau dan komunitas Nova (2018) . Istilah *local genius* pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales (1948), kemudian dikembangkan dalam diskursus Antropologi Indonesia untuk merujuk pada kemampuan adaptif budaya lokal dalam menerima, menyaring, dan mentransformasi pengaruh luar sesuai dengan kebutuhan logika budaya setempat. Dalam konsep Geertz, *local genius* adalah manifestasi kecerdasan budaya (*cultural intelligence*) dalam kemampuan untuk mengembangkan solusi-solusi adaptif yang tumbuh dari dalam (*endogeneous*), bukan didiktekan dari luar. *Local genius* dalam konteks masyarakat bantaran sungai di Kota Medan mencakup; (a) pengetahuan ekologis lokal tentang perilaku sungai, (b) teknologi adaptif tradisional dalam menghadapi banjir, sistem sosial yang berfungsi sebagai mekanisme mitigasi, (d) kearifan simbolik yang mengatur relasi manusia dengan sungai secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori *thick description* Geertz terletak pada kemampuan memahami interkoneksi antara makna, nilai, norma, dan *local genius* sebagai satu sistem budaya yang utuh. Maka dari itu dapat disimpulkan; makna sungai sebagai entitas hidup, artinya melahirkan nilai penghormatan terhadap sungai, nilai penghormatan adalah dapat menghasilkan norma ritual dan pantang-larang, norma ritual adalah terinstitusionalisasi dalam *local genius*(Francis (2002) seperti sistem pembacaan tanda dan arsitektur adaptif, *local genius* adalah dapat memperkuat makna positif tentang hidup berdampingan dengan sungai.

Dalam hal pengakajian rumusan masalah pada kebijakan pemerintah terhadap normalisasi sungai dengan ruang sosial, dan identitas budaya (Salmah dan Sjarifah, 2003) masyarakat bantaran sungai di Kota Medan adalah mencakup pengerukan, pelurusan air sungai, pembangunan tanggul beton, dan relokasi permukiman bantaran yang secara teknis dirancang untuk mengurangi resiko banjir. Namun, dari perspektif antropologi, kebijakan ini bukan sekedar intervensi teknis-hidrologis. Perspektif antropologi adalah intervensi terhadap ruang sosial dan identitas budaya. Ada sebuah tindakan yang mengubah cara hidup, cara bermakna, dan cara menjadi (*being*) suatu komunitas. Kota Medan yang dialiri oleh sungai utama; Sungai Deli, Babura, Belawan, dan Sei Sikambing, semuanya mengalami tekanan berat akibat urbanisasi massif. Kebijakan normalisasi ayng dilakukan pemerintah kota dan pusat mencakup; (a) pengerukan dan pelurusan air sungai, (b) pembangunan tanggul beton (*sheet pile*) di sepanjang bantaran, (c) pembersihan permukiman di sempadan sungai (garis sempadan sungai), (d) program relokasi warga bantaran ke rumah susun (rusun) atau lokasi lain, (e) penataan ruang bantaran menjadi taman kota, jalur hijau, atau infrastruktur publik.

Dimensi tata ruang sosial, merujuk pada Henri Lefebvre *The Production of Space* (1974), berpendapat bahwa ruang sosial bukan sekedar wadah fisik yang netral, ruang adalah produk sosial yang diproduksi, dikonsumsi, dan dikontestasikan. Beliau membedakan dengan

Dimensi	Konsep	Penjelasan	Contoh Konteks Sungai di Kota Medan
Ruang yang dipersepsikan	<i>Perceived space/Spatial Practice</i>	Ruang sebagaimana digunakan dalam praktik sehari-hari	Sungai sebagai tempat mandi, mencuci, memancing, bermain anak
Ruang yang dikonsepsikan	<i>Conceived space/Representations of space</i>	Ruang sebagaimana direncanakan oleh ahli, birokrat, perencana	Sungai dalam peta tata rtuang kota, zona sempadan, regulasi garis sempadan sungai (GSS)
Ruang yang dihayati	<i>Lived spaceRepresentational space</i>	Ruang sebagaimana hayati secara simbolik dan emosional	Sungai sebagai tempat kenangan, identitas, ritual, leluhur

Analisis Antropologis adalah normalisasi sungai adalah dominasi “ruang yang dikonsepsikan” (negara/perencana) atas “ruang yang hayati” (masyarakat). Pemerintah mengintervensi dengan logika teknis-spasial tanpa mengakui bahwa sungai telah lama menjadi ruang hidup yang sarat makna bagi komunitas bantaran. Dimensi sungai sebagai ruang sosial multidimensi Henri (1991), sebelum normalisasi, bantaran sungai di Kota Medan berfungsi sebagai ruang sosial multidimensi; Pertama. Ruang Produksi dan Reproduksi Ekonomi, dilakukan untuk (a) tempat nelayan, penambang pasir, dan pedagang perahu mencari afkah, (b) pasar informal yang tumbuh organik di tepi sungai, (c) sumber air untuk usaha kecil (*laundry*, warung), Kedua, Ruang Reproduksi Sosial, berfungsi untuk (a) tempat pertemuan informal warga (ngobrol, nongkrong), (b) arena sosialisasi anak-anak dan remaja, (c) tempat berlangsungnya pertukaran informasi dan gossip komunal, Ketiga, Ruang Reproduksi Budaya, berfungsi sebagai (a) lokasi ritual adat dan keagamaan, (b) tempat upacara daur hidup (mandi bayi, pengobatan tradisional), (c) ruang transmisi pengetahuan ekologis antar generasi, Keempat, Ruang Reproduksi Identitas, dapat berfungsi sebagai (a) penanda batas komunitas (kami orang bantaran deli), (b) sumber narasi sejarah dan mitologi komunal, (c) pembentuk memori kolektif yang mengikat generasi.

Menurut Julian Steward dalam *Theory of Culture Change* (1955) memperkenalkan ekologi budaya dengan pendekatan yang menelaah bagaimana budaya beradaptasi terhadap lingkungan fisik. Steward berargumen bahwa fitur-fitur inti budaya (*cultural core*) dibentuk oleh cara komunitas mengeksploitasi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Bagi masyarakat bantaran sungai di Kota Medan, “*cultural core*” yang terbentuk dari adaptasi terhadap sungai adalah dengan cara; (a) membuat sistem arsitektur rumah panggung, (b) kelender musim yang berorientasi pada siklus banjir, (c) pembagian kerja berbasis relasi dengan sungai, (d) ritual dan sistem kepercayaan berkaitan dengan sungai. Maka dari itu normalisasi sungai dapat mengubah lingkungan secara radikal tanpa memberikan waktu bagi adaptasi budaya yang organik. Keadaan ini menciptakan apa yang dapat disebut “*disjuncture* ekologi budaya”. Artinya budaya yang telah beradaptasi dengan lingkungan X tiba-tiba dipaksa hidup di lingkungan Y yang sangat berbeda.

Dalam hal pengkajian identitas budaya adalah menggunakan Teori Identitas Sosial oleh Stuart Hall (1996), Beliau berargumen bahwa identitas bukan sesuatu yang tetap dan esensial, melainkan sebuah proses produksi yang tidak pernah selesai (*production, not product*). Artinya, selalu dalam proses negoisasi dengan kondisi historis, sosial, dan kultural yang berubah. Identitas masyarakat bantaran sungai di Kota Medan adalah identitas yang dikonstruksikan secara relasional. Artinya, sungai dapat bermakna dalam relasi dengan arti bahwa; (a) sungai sebagai entitas fisik dan simbolik, (b) komunitas tetangga yang berbagi pengalaman banjir, (c) sejarah permukiman dan perjuangan di tepian sungai, (d) ancaman luar (penggusuran, normalisasi) yang memperkuat solidaritas identitas. Normalisasi dan relokasi memaksa negoisasi ulang identitas ini dalam kondisi yang tidak setara. Artinya, komunitas dipaksa meninggalkan salah satu penanda identitas terkuatnya.

Memahami normalisasi sungai dalam lingkup ruang sosial sebagai kebijakan Robert (1983) adalah hal yang mencakup; pengerukan dan pelurusan alur sungai (*river straightening*), pembangunan tanggul dan dinding penahan banjir (*flood walls, levees*), penetapan dan pembersihan garis sempadan sungai (*riparian buffer zones*), relokasi permukiman bantaran ke lokasi lain, dan penataan ulang bantaran sebagai ruang publik atau infrastruktur kota. Hal-hal ini adalah kebijakan teknis yang netral. Namun tidak ada ruang yang netral. Maka setiap intervensi ruang adalah intervensi terhadap kehidupan sosial budaya yang berlangsung di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal lebih lanjut untuk membuat kebijakan pemerintah dari analisis antropologis Robert (1983) yang berkeadilan budaya adalah; (a) Pengakuan (*recognition*), artinya, mengakui sungai sebagai ruang sosial dan budaya, bukan hanya infrastruktur hidrologis. Hal ini berarti mengakui hak komunitas untuk dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut sungai dan bantarnya, (b) Partisipasi Bermakna (*meaningful recognition*), artinya, melibatkan komunitas bukan sebagai objek konsultasi, tetapi sebagai subjek perancangan kebijakan (*co-designers*). Partisipasi bermakna adalah mengintegrasikan perspektif komunitas dalam keputusan akhir, (c) Integrasi Pengetahuan Lokal, artinya, menempatkan kearifan lokal dan *local genius* komunitas bantaran sungai sumber daya yang sah dan berharga dalam perancangan teknis, bukan sebagai hambatan yang harus diatasi, (d) Kontinuitas Komunal, artinya, jika relokasi tidak terhindarkan, memastikan bahwa komunitas dipindahkan bersama, bukan dipecah-pecah, sehingga jaringan sosial dan modal komunal dapat dipertahankan, (e) Kompensasi yang Komprehensif, artinya mengakui bahwa kompensasi yang adil bukan hanya finansial (*nilai property*), tetapi juga mencakup kompensasi atas modal sosial, identitas budaya, dan jaringan komunal yang hilang, (f) Mitigasi Berbasis Komunitas, artinya, mengembangkan *Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR)* (Robert 1983) yang menempatkan komunitas sebagai agen utama mitigasi, bukan objek perlindungan pasif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan hubungan manusia dengan sungai bukan semata-mata hubungan ekologis-fisik, melainkan hubungan bersifat ontologis, epistemologis, dan eksistensial. Bagi masyarakat bantaran sungai di Kota Medan, sungai adalah entitas hidup yang menjadi pusat gravitasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual. Dengan menggunakan pendekatan *thick description* Clifford Geertz sebagai landasan metodologis, dan didukung oleh teori antropologi. Penelitian ini berhasil membongkar/mengkaji lebih dalam lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dibalik perilaku masyarakat bantaran sungai yang sering disalahpahami oleh logika kebijakan konvensional.

Konstruksi budaya tentang sungai, sistem pengetahuan lokal, dan identitas komunal, bukanlah tiga hal yang terpisah. Namun merupakan satu sistem sosial budaya yang kohesif dan saling menopang. Makna tentang sungai, adalah melahirkan nilai penghormatan, nilai penghormatan menghasilkan norma dan praktik, norma dan praktik terinstitusionalisasi dalam *local genius*, dan *local genius* memperkuat kembali makna positif tentang hidup berdampingan dengan sungai. Kebijakan normalisasi sungai dirancang untuk melindungi manusia dari banjir. Secara paradoks, hal ini menghancurkan sistem adaptasi yang paling efektif; komunitas yang kohesif, pengetahuan lokal yang presisi, dan modal sosial yang teruji. Hal ini adalah ironi fundamental yang harus menjadi titik tolak reformasi kebijakan. Akses terhadap sungai dan hak untuk mendefinisikan relasi dengan sungai adalah hak budaya (*culture rights*) yang dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Normalisasi yang dilakukan tanpa persetujuan dan partisipasi bermakna, komunitas bantaran bukan hanya buruk secara kebijakan, bahkan juga bermasalah secara moral dan hukum. Selain dari itu, ada tiga hal temuan besar penelitian ini yang saling berkaitan dan membentuk satu argument kohesif; sungai adalah ruang budaya yang hidup, pengetahuan lokal adalah sistem adaptasi yang sah, dan kebijakan normalisasi yang mengabaikan keduanya bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak efektif.

Hal-hal yang menjadi saran pada penelitian, untuk bidang antropologis adalah melakukan integrasi perspektif budaya dan tata ruang sungai. Hal yang dilakukan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan dan dokumen perencanaan terkait sungai harus direvisi dengan tujuan; (a) untuk mengakui fungsi sosial budaya bantaran sungai di samping fungsi ekologis dan hidrologis, (b) menetapkan zona interaksi komunal di sepanjang bantaran sungai yang memungkinkan kegiatan sosial budaya berlangsung, (c) mengintegrasikan narasi budaya dan sejarah tentang sungai dalam desain ruang publik bantaran, (d) mengembangkan "*river cultural heritage zones*" yang melindungi lokasi-lokasi bersejarah dan bermakna budaya di sepanjang sungai. Pemerintah juga disarankan melakukan inventerisasi komprehensif pengetahuan lokal (*local genius*) masyarakat bantaran sungai di Kota Medan melalui; (a) program dokumentasi etnografis sistematis tentang pengetahuan ekologis komunitas bantaran sungai, (b) pengakuan formal atas sistem peringatan dini komunal sebagai bagian dari sistem peringatan dini kota, (c) integrasi kearifan lokal tentang perilaku sungai dalam desain teknis normalisasi, (d) pelibatan "ahli lokal" warga senior yang menyimpan pengetahuan ekologis untuk tim perencanaan.

Saran untuk akademisi dan peneliti, peneliti lanjutan disarankan dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner yang lebih kaya; (a) kolaborasi antara antropologi, ekologi, teknik sipil, psikologi lingkungan, dan perencanaan kota, (b) kajian longitudinal untuk memantau perubahan konstruksi budaya dan pengetahuan lokal dari waktu ke waktu, (c) studi komparatif antar sungai di Kota Medan untuk mengidentifikasi variasi dan pola, (d) kajian tentang dampak psikologis (solastalgia, trauma relokasi) yang masih sangat kurang diteliti di konteks Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- A. Putri, "Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal (Local Knowledge, Local Wisdom, dan Local Genius)," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, vol. 6, no. 1, 2022.
- A. S. Aksa, "Community adaptation strategies toward tidal flood: A Case study in Indonesia," *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, vol. 13, no. 1, 2021.
- Adi, K., 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- C. Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development: Putting The Last First*. New York: Longman Scientific & Technical.
- Geertz, C., 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York : Basic Books.
- Hall, S., & du Gay, P. (ed). 1996. *Questions of Cultural Identity*. London: Sage Publications.
- Henry, Simamora. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ke-3. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Keesing, Roger M.1992. *Antropologi Budaya: suatu Perspektif Kontemporer* (Alih Bahasa: Samuel Gunawan). Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Jakarta.
- Lefebvre, H. 1974. *The Production of Space* (D. Nicholson-Smith Terj., 1991). Oxford: Blackwell.
- Lefebvre, H., 1991. *The Production of Space*. Diterjemahkan dari Bahasa Pranci oleh D. Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell.
- M. Hanif, et al., "Menguatkan Kembali Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat: Belajar dari Kearifan Lokal di Indonesia," *IJD-Demos*, vol. 4, no. 1, 2022.
- M. Harris, "History and Significance of the Emic/Etic Distinction," *Annu. Rev. Anthropol.*, vol. 5, pp. 329-350, 1976.
- Mursin., Laniampe, H., H.L.H., Salebaran, S., & Said, T. 2005. *Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Mendukun Kemandirian Masyarakat Lokal*. Innovative: Journal of Social Science Research, Kendari, 5 (2).
- R. Hutagalung, "Kondisi Sosial-Ekonomi dan Alasan Bertahannya Masyarakat di Daerah Rawan Banjir Kelurahan Hamdan Medan," *Jurnal Socius*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Rosidi, Ajip. 2011. *Kaerifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama.
- Salmah, Sjarifah. 2010. *Penataan Bantaran Sungai Ditinjau Dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: CV. Trans Indo Media.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. Florida: Harcourt Brace Jovanovich College.
- V. Ariyanti, B. A. Azka, dan D. M. M. Nur, "Mitigasi Bencana Berbasis Budaya Lokal: Adaptasi Komunitas Desa Terhadap Bencana Banjir," *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 2025.